



BANTUAN PRODUKTIF USAHA MIKRO Tak Ada Kuota Daerah, Kesempatan Terbuka Lebar

YOGYA (KR) - Pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) di Kota Yogya yang mengakses bantuan produktif dari pemerintah pusat tergolong rendah. Kesempatan untuk memperoleh hibah senilai Rp 2,4 juta itu pun masih terbuka lebar lantaran tidak ada kuota daerah.

Kepala Bidang Usaha Mikro Kecil Dinas Koperasi UMK Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogya Bebasari Sitarini SP MMA, menjelaskan bantuan produktif tersebut merupakan program pemerintah pusat untuk mengantisipasi dampak pandemi bagi pelaku UKM. "Total target nasional ialah 21 juta pelaku UKM, dan kini yang sudah dinilai baru 2,4 juta pelaku UKM. Tidak ada batasan kuota bagi tiap daerah. Jadi daerah bisa mengusulkan sebanyak-banyaknya," jelasnya dalam jumpa pers, Kamis (3/9).

Dari total pelaku UKM di Kota Yogya sekitar 26.000 pelaku, baru 6.900 pelaku yang sudah mendaftar. Dari jumlah yang mendaftar tersebut, 3.232 pelaku di antaranya sudah dinyatakan lolos di tingkat DIY dan telah diusulkan ke pusat. Dibanding-

kan dengan kabupaten lain di DIY, usulan dari Kota Yogya juga paling rendah. Paling tinggi Gunungkidul dengan 56.219 pelaku, disusul Bantul 21.091 pelaku, Kulonprogo 9.232 pelaku, dan Sleman 5.568 pelaku.

Sitarini menyebut, masih rendahnya pelaku UKM di Kota Yogya yang mendaftar ditengarai karena sudah banyak yang mengakses kredit modal perbankan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR). Hal ini karena salah satu syarat untuk bisa lolos ialah tidak sedang menjadi peserta kredit perbankan. "Kami dibatasi waktu pendaftaran hingga 10 September 2020. Kami siap memfasilitasi pendaftaran melalui WA ke 089623559300 pada jam kerja. Kesempatan masih sangat terbuka," tandasnya.

Syarat lainnya ialah memiliki Izin

Usaha Mikro (IUM), KTP Kota Yogya serta kekayaan bersih maksimum Rp 50 juta atau penjualan per tahun Rp 300 juta. Di samping itu usahanya sudah berjalan minimal tiga bulan terakhir dan bukan aparatur ASN, TNI, Polri maupun BUMD. Pendaftar juga harus menyertakan nomor telepon karena ketika dinyatakan lolos akan dihubungi pihak bank untuk pemberkasan. "Setelah lolos dari provinsi nanti masih diverifikasi oleh pusat. Hasil akhir berapa pelaku yang lolos di pusat, kami belum mendapatkan informasi. Tetapi sudah ada beberapa dari Kota Yogya yang menerima dan diberikan saat kunjungan Presiden RI akhir bulan lalu," paparnya.

Bagi pelaku UKM yang belum memiliki IUM juga tidak perlu berkecil hati. Pasalnya, prosedur perizinan sangat mudah dan bisa dibantu oleh dinas melalui akses One Single Submission (OSS). Kepemilikan IUM juga memberikan kemanfaatan karena tercatat resmi di database dinas serta berhak atas berbagai program pendampingan dari pemerintah. (Dhi)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Koperasi UMK Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 18 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005